BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Keuangan

1. Pengertian Manajemen

Menurut Stephen P. Robbins and Mary Coulter, sebagaimana dikutip oleh Serian Wijatno, Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Manajemen tidak sekadar mengelola sumber daya manusia, namun juga memanfaatkan sumber daya finansial dan material secara optimal. Tujuannya adalah agar standar yang ditetapkan organisasi dapat terpenuhi.¹⁰

Manajemen berperan penting dalam menghasilkan lingkungan kerja yang produktif dan memotivasi karyawan. Hal ini memastikan seluruh aktivitas organisasi berlangsung sesuai rencana yang telah dibuat.¹¹

Manajemen dapat dipahami sebagai kegiatan yang mencakup tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen membutuhkan koordinasi yang baik antarbagian

¹⁰ Serian Wijatno, *Pengantar Entrepreneurship* (Grasindo), 224.

¹¹ Ricky W. Griffin, *Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2004), 9.

organisasi. Dengan demikian tercipta sinergi yang memungkinkan organisasi mencapai hasil optimal.¹²

Dengan kata lain, manajemen merupakan sebuah proses terpadu yang mencakup langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan demi pencapaian tujuan organisasi. Selain memaksimalkan peran sumber daya manusia, manajemen juga memastikan pemanfaatan sumber daya lain secara efisien. Dengan koordinasi yang baik, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif serta mencapai hasil optimal.

2. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen merupakan tugas penting dalam membimbing aktivitas organisasi demi mendapatkan target yang telah ditetapkan. Proses ini dimulai dengan perencanaan, yaitu tahap awal di mana organisasi menetapkan tujuan dan langkah yang akan diambil.¹³ Ada juga yang berpendapat bahwa merencanakan secara cermat, organisasi bisa menggunakan sumber dayanya secara efisien dan mengambil keputusan yang lebih tepat.¹⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan memungkinkan organisasi mengantisipasi perubahan, mengoptimalkan sumber daya, dan menjadi fondasi untuk fungsi manajemen lain.

¹² George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020), 18.

¹³ Handoko, T. Hani. *Manajemen*. (Yogyakarta: BPB, 2011), 45-47.

¹⁴ Siagian, Sondang P. *Manajemen Perencanaan dan Strategi*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 30-33.

Setelah rencana disusun, pengorganisasian dilakukan dengan membagi tugas secara teratur dan jelas.¹⁵ Ada juga yang berpendapat bahwa pengorganisasian memastikan setiap individu memahami perannya, sehingga kerja sama dapat terjalin dengan baik dan konflik peran dapat diminimalkan.¹⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian memastikan membagi tugas secara efisien, memperjelas peran, dan memperkuat koordinasi dalam organisasi.

Selanjutnya, pengarahan menjadi kunci dalam menggerakkan anggota organisasi melalui motivasi dan kepemimpinan yang efektif.¹⁷ Di sisi lain, pengarahan menyelaraskan kepentingan pribadi dengan tujuan organisasi agar pekerjaan berjalan harmonis.¹⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengarahan berperan penting dalam memotivasi karyawan, memimpin karyawan menuju tujuan, dan menyelaraskan kepentingan pribadi dan organisasi.

Kemudian pengendalian dilakukan dengan memantau, mengevaluasi, dan membandingkan hasil kerja dengan target yang telah ditetapkan.¹⁹ Pengendalian berperan dalam mendeteksi penyimpangan dan melakukan perbaikan yang diperlukan demi tercapainya keberhasilan organisasi secara keseluruhan.²⁰

¹⁵ Stephen P. Robbins dan Mary Coulter. *Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 58.

¹⁶ Syarif Hidayat, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Deeppublish, 2015), 61.

¹⁷ George R. Terry *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020), 214.

¹⁸ Hasibuan, Malayu S.P. *Management: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 90-93.

¹⁹ Gomes, Faustino Cardoso. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: Andi, 2003), 150-152.

²⁰ Fahmi, Irham. *Manajemen Kinerja*. (Bandung: Alfabeta, 2012), 170-172.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengendalian menjaga organisasi tetap sesuai rencana, mengevaluasi kinerja, dan memperbaiki penyimpangan untuk memastikan keberhasilan.

3. Tujuan Manajemen

Menurut G.R. Terry, manajemen bertujuan untuk mencapai target organisasi secara efektif dan efisien. Efektivitas diukur dari kemampuan organisasi mencapai tujuan, sedangkan efisiensi terkait dengan penggunaan sumber daya secara optimal. Dengan kata lain, manajemen membantu organisasi menggunakan waktu, tenaga, dan biaya sebaik mungkin untuk meraih hasil yang diinginkan.²¹

Siagian menekankan bahwa tujuan manajemen tidak hanya soal hasil, tetapi juga untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan memotivasi karyawan. Manajemen berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan agar berjalan selaras, sehingga semua anggota tim merasa dihargai dan berkontribusi maksimal. Dengan begitu, tujuan pribadi karyawan dan organisasi dapat tercapai secara bersamaan.²²

Dari kedua pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen mencakup pencapaian target organisasi, penggunaan sumber daya secara efisien, serta penciptaan lingkungan kerja yang mendukung kinerja optimal. Dengan menjalankan fungsi manajemen secara baik, organisasi dapat

²¹ George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020), 14-16.

²² Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 22-24.

memastikan keberhasilan baik dari sisi operasional maupun kesejahteraan karyawan.

4. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan mencakup kegiatan untuk memperoleh, menggunakan, dan mengelola dana perusahaan secara efisien. Tujuannya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham.²³ Arthur J. Keown memandang manajemen keuangan sebagai seni dan ilmu dalam mengelola uang untuk mencapai tujuan organisasi. Pandangannya menekankan pentingnya keputusan investasi, pembiayaan, dan manajemen aset dalam rangka menciptakan nilai tambah.²⁴

James C. Van Horne, mengartikan manajemen keuangan sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pemeliharaan, serta pengendalian sumber daya keuangan perusahaan. Bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana secara efisien dan efektif.²⁵

Ketiga pendapat ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan adalah proses strategis dalam mengelola sumber daya finansial untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Meski menggunakan pendekatan berbeda, mereka sepakat bahwa keputusan investasi, pembiayaan, serta pengendalian risiko

²³ Suad Husnan, *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan* (Yogyakarta: BPB, 2015), 2-4.

²⁴ Arthur J. Keown et. al., *Dasar-Dasar Keuangan: Logika dan Praktik Manajemen Keuangan*, Edisi ke-8 (Boston: Pearson, 2014), 3-6.

²⁵ James C. Van Horne dan John M. Wachowicz, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Edisi ke-13 (Boston: Pearson, 2009), 10-12.

memegang peran utama dalam meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemilik.

Beberapa definisi manajemen keuangan menurut para ahli sebagaimana dikutip oleh Samsurijal Hasan, dkk., sebagai berikut: Joseph Massie, mendefinisikan manajemen keuangan adalah kegiatan operasional bisnis yang bertanggung jawab untuk memperoleh dan menggunakan dana yang diperlukan untuk operasi yang efektif dan efisien.

Sonny, S, mendefinisikan manajemen keuangan sebagai aktivitas suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga dalam mengelola dana. Depdiknas, menjelaskan bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencacatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.²⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan seluruh rangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, untuk memperoleh dan mengelola dana secara efisien dan efektif.

5. Tujuan Manajemen Keuangan

Menurut Husnan, inti tujuan manajemen keuangan ialah mengoptimalkan nilai perusahaan bagi para pemilik saham. Artinya, setiap keputusan keuangan

²⁶ Samsurijal Hasan, dkk., *Manajemen Keuangan* (Penerbit: CV. Pena Persada, 2022), 2-4.

harus diambil untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham secara jangka panjang, bukan hanya sekadar mencari keuntungan jangka pendek.²⁷

Riyanto, menyebutkan bahwa tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan laba perusahaan, tetapi dengan memperhatikan risiko yang terkait. Maksimasi laba ini bukan semata-mata mengejar angka profit, melainkan harus dilakukan secara efisien dan memperhatikan keberlanjutan usaha.²⁸

Sartono, menyatakan bahwa manajemen keuangan bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan dan menjaga keberlangsungan bisnis di masa depan, termasuk mengelola likuiditas dan struktur modal secara optimal.²⁹

Ketiga penulis sepakat bahwa tujuan utama manajemen keuangan bukan hanya soal mencari keuntungan semata, tetapi mencakup upaya memaksimalkan nilai perusahaan, menjaga keseimbangan risiko dan laba, serta menjamin kelangsungan usaha. Fokus utama ada pada kesejahteraan pemegang saham dan keberlangsungan bisnis yang sehat.

6. Fungsi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya keuangan supaya penggunaannya tepat guna dan efektif demi tercapainya tujuan

²⁷ Suad Husnan, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), 84–85.

²⁸ Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan* (Yogyakarta: BPB, 2001), 56–58.

²⁹ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPB, 2001), 36–38.

organisasi. Fungsi utama manajemen keuangan meliputi perencanaan keuangan yang memastikan alokasi dana sesuai kebutuhan, penganggaran sebagai alat pengendalian penggunaan dana berarti anggaran digunakan untuk membantu mengatur dan mengawasi bagaimana uang digunakan dalam suatu organisasi atau kegiatan, pengelolaan kas yang menjaga arus kas agar tetap lancar, pengendalian keuangan yang bertujuan mencegah penyalahgunaan dana melalui monitoring dan audit, pelaporan keuangan yang transparan sebagai bentuk akuntabilitas, serta evaluasi dan analisis keuangan untuk menilai keberhasilan penggunaan dana dan memberikan rekomendasi perbaikan.³⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi ini penting dalam konteks pengelolaan dana lembang untuk perbaikan infrastruktur jalan, agar penggunaan dana dapat berjalan sesuai perencanaan dan hasilnya optimal.

7. Dasar Alkitabiah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru

Adapun dasar Alkitabiah yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami manajemen keuangan, khususnya dalam pengelolaan dana lembang, ialah prinsip tanggung jawab dan integritas dalam mengelola berkat yang dipercayakan Tuhan. *Lukas 16:10*, disebutkan bahwa "*Barangsiapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar.*"³¹ Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan ketekunan dalam mengelola sumber daya, termasuk keuangan publik di tingkat desa.

³⁰ Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), 12.

³¹ Alkitab Perjanjian Baru Lukas 16:10, LAI: Terjemahan Baru (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2009).

Salah satu tokoh Alkitab yang menjadi teladan dalam kepemimpinan yang jujur, bertanggung jawab, dan terbuka adalah Nehemia. Ia dikenal sebagai pemimpin yang memulihkan tembok Yerusalem dengan penuh integritas dan keterbukaan, meskipun menghadapi berbagai tantangan dari dalam maupun luar bangsanya. Kejujuran Nehemia tercermin dari sikapnya yang tidak memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Dalam *Nehemia 5:14*, ia berkata, “Selama dua belas tahun aku menjadi bupati di tanah Yehuda., aku dan saudara-saudaraku tidak mengambil bagian dari makanan yang menjadi hak pejabat.” Hal ini menunjukkan bahwa ia menjaga integritasnya dalam penggunaan sumber daya dan dana publik, serta tidak mengambil apa yang bukan menjadi haknya.

Selain jujur, Nehemia juga menunjukkan tanggung jawab dan keteladanan dalam memimpin. Ia tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga turun langsung dalam proses pembangunan tembok. Ia memperhatikan keadaan rakyat dan menegur para pemimpin yang tidak adil. Dalam *Nehemia 5:7*, ia menyatakan, “Aku menyelidiki keadaan mereka dan menegur para pemuka dan penguasa.” Sikap ini menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan memastikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan tujuan yang benar.

Keterbukaan Nehemia juga sangat terlihat dari caranya melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Ia menjelaskan tujuan pembangunan secara terbuka dan membagi tugas secara adil agar tercipta kerja sama dan rasa memiliki di tengah masyarakat. Seperti yang dikatakannya dalam *Nehemia 2:17*, “Lalu aku

berkata kepada mereka: Kamu melihat kemalangan yang kita alami., Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem.” Hal ini menunjukkan bahwa Nehemia menghargai partisipasi dan keterlibatan masyarakat sebagai bagian penting dalam keberhasilan sebuah pekerjaan umum.

Dalam konteks pengelolaan dana untuk perbaikan infrastruktur jalan di Dusun Pa'pisungan, Lembang Buntu Minanga, nilai-nilai kepemimpinan yang diteladani dari Nehemia sangat relevan untuk diterapkan dalam manajemen keuangan yang efektif. Kejujuran menjadi hal utama, di mana dana yang diperoleh dari pemerintah atau sumber lain harus digunakan sepenuhnya untuk keperluan pembangunan jalan, tanpa adanya penyalahgunaan untuk keperluan pribadi dan kelompok tertentu. Selanjutnya, sikap tanggung jawab juga harus ditunjukkan dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan pekerjaan, yang harus dijalankan sesuai dengan aturan dan diawasi secara transparan. Keterbukaan juga sangat penting, di mana masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi, serta diberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana dan perkembangan proyek. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan tersebut, pengelolaan dana pembangunan jalan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin dan pengelola Lembang.

8. Refleksi Teologis: Kejujuran dan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Dana Publik

Pengelolaan keuangan lembang, khususnya dalam proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan di Dusun Pa'pisungan, merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab yang dipercayakan kepada para pemimpin dan pengelola dana. Dalam perspektif iman Kristen, pengelolaan ini bukan semata tindakan administratif atau teknis, melainkan juga tindakan spiritual yang menunjukkan kesetiaan dan integritas di hadapan Tuhan. Lukas 16:10 memberikan dasar yang kuat: *"Barangsiapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar."*

Ayat ini menegaskan bahwa kesetiaan dan kejujuran dalam hal-hal kecil, seperti perencanaan anggaran, pelaporan, dan pengadaan barang atau jasa menjadi cerminan karakter seseorang yang layak dipercaya untuk perkara yang lebih besar. Dalam konteks dusun dan lembang, keuangan publik adalah berkat dari Tuhan yang harus dikelola dengan rasa takut akan Allah dan tanggung jawab moral yang tinggi. Tokoh Nehemia menjadi contoh teladan yang sangat relevan. Ia tidak hanya membangun tembok Yerusalem secara fisik, tetapi juga membangun kembali kepercayaan rakyat melalui gaya kepemimpinan yang bersih, adil, dan terbuka. Dalam Nehemia 5:14, kita melihat bahwa Nehemia menolak mengambil hak-hak istimewa sebagai pejabat, demi menjaga integritasnya. Di tengah konteks korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang kerap terjadi, teladan Nehemia mengingatkan kita bahwa kepemimpinan yang takut akan Tuhan menolak keuntungan pribadi dari sumber daya publik.

Nehemia juga menunjukkan keberanian moral saat menegur para pemimpin yang menindas rakyat (Nehemia 5:7), dan secara aktif mengajak masyarakat terlibat dalam pembangunan (Nehemia 2:17). Hal ini mencerminkan prinsip partisipasi dan transparansi adalah dua elemen penting dalam manajemen keuangan yang efektif dan berorientasi pada keadilan sosial.

Dalam konteks Dusun Pa'pisungan, manajemen keuangan lembang harus dipahami sebagai bagian dari panggilan untuk menjadi hamba yang setia dalam perkara publik. Ketika dana pembangunan digunakan secara jujur dan transparan, hal itu tidak hanya berdampak pada keberhasilan proyek, tetapi juga menjadi kesaksian iman bagi masyarakat dan generasi selanjutnya. Keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan menjadi tanda bahwa para pemimpin dan pelaksana proyek bekerja dengan hati yang takut akan Tuhan dan menghargai setiap rupiah yang dipercayakan kepada mereka.

Refleksi ini menantang setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan dana lembang untuk meneladani Nehemia dalam tiga hal penting:

- a. Kejujuran yaitu: Menolak segala bentuk manipulasi dana dan bersikap jujur dalam setiap transaksi.
- b. Tanggung Jawab yaitu: Menyadari bahwa setiap tindakan keuangan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan masyarakat.
- c. Keterbukaan yaitu: Melibatkan warga dalam perencanaan dan evaluasi, serta menyampaikan laporan secara transparan.

Dengan demikian, pengelolaan dana publik bukan hanya tugas administratif, tetapi juga wujud ibadah dan pengabdian kepada Allah dan sesama. Membangun jalan berarti membuka akses kehidupan, dan setiap rupiah yang digunakan secara bertanggung jawab menjadi benih yang ditanam untuk kesejahteraan bersama, dengan iman bahwa Allah memberkati mereka yang setia dalam perkara kecil maupun besar.

B. Konsep Desa dan Pengelolaan Dana Desa

1. Pengertian Desa (Lembang)

Desa adalah unit administratif terkecil yang terdiri dari sejumlah keluarga dan dikelola oleh seorang Kepala Lembang yang dipilih langsung oleh warga setempat.³² Sebagai kesatuan hukum masyarakat terkecil, desa memiliki hak untuk menyelenggarakan pemerintahan demi memenuhi kepentingan warganya.³³

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan menangani berbagai urusan di desa, membutuhkan dana yang memadai. Di mana pemerintah juga mendorong keterlibatan penuh masyarakat dalam upaya pembangunan desa melalui forum musyawarah bersama. Sebagai pihak yang bertanggung jawab mengurus kepentingan publik, perangkat desa diharapkan mampu mengelola

³² Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: INSISTPress, 2012), 45.

³³ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: INSISTPress, 2012), 46-47.

potensi yang ada, termasuk Dana Desa, dengan baik dan efisien. Dengan begitu, pembangunan desa bisa berjalan lebih lancar dan berkelanjutan.³⁴

Keuangan desa dapat dinilai dalam bentuk uang berupa kekayaan yang bisa diukur secara finansial, termasuk aset desa yang bernilai uang. Hal ini mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dihitung secara finansial, seperti pendapatan, belanja, aset, serta tanggung jawab desa.³⁵ Pengelolaan keuangan desa yang baik wajib didasari prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, partisipasi masyarakat, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran.³⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desa (lembang) adalah satuan pemerintahan paling kecil yang berperan penting dalam mengelola kepentingan dan pembangunan masyarakatnya. Agar tugas-tugas desa berjalan lancar, dibutuhkan pengelolaan keuangan yang memadai sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga. Pengelolaan ini harus mengedepankan keterbukaan, tanggung jawab, serta disiplin anggaran demi pemanfaatan sumber daya yang maksimal. Dengan demikian, kemampuan perangkat desa dalam mengelola potensi dan dana desa menjadi kunci suksesnya pembangunan di tingkat desa.

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pasal 1-5, <https://peraturan.bpk.go.id/home/Details/38585/uu-no-6-tahun-2014>.

³⁵ D. Supriyadi, *Manajemen Keuangan Desa* (Bandung: Alfabeta, 2016), 25-27.

³⁶ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Pasal 2-5, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112503/permendagri-no-20-tahun-2018>.

2. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa merupakan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan warga desa. Setiap tahunnya, Dana Desa ini dialokasikan dalam APBN dan diberikan kepada masing-masing desa sebagai salah satu sumber pendapatan utama mereka. Kebijakan ini juga berperan dalam menyatukan dan memaksimalkan berbagai skema pendanaan yang sebelumnya telah dialokasikan pemerintah kepada desa.³⁷

Salah satu kelebihan dana desa adalah pendanaannya yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dapat direalisasikan melalui program tanggap cepat yang pelaksanaannya bisa segera dimulai; berfungsi sebagai pelengkap terhadap berbagai program lain dalam mengatasi persoalan masyarakat dan ekonomi; yang tidak memerlukan pembentukan sistem baru sehingga aparatur desa bisa langsung melaksanakan karena telah menguasai tata cara yang berlaku. Pada akhirnya, hal ini turut memperkuat kredibilitas serta legitimasi pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah di tingkat lokal. Selain itu, terdapat pula sistem pemantauan, evaluasi,

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pasal 72, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38585/uu-no-6-tahun-2014>.

dan pelaporan yang bisa dioptimalkan guna menjamin akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.³⁸

Dana Desa dimanfaatkan untuk mendukung berbagai aspek, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur dan layanan, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Dalam hal pengalokasiannya, setiap pemerintah kabupaten atau kota diwajibkan menyalurkan dana ke seluruh desa yang berada di wilayahnya. Proses distribusi ini mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah desa atau kelurahan, jumlah penduduk (30%), luas wilayah administratif (20%), serta tingkat kemiskinan daerah (50%). Penyesuaian juga dilakukan berdasarkan kesulitan geografis masing-masing desa. Anggaran tersebut disalurkan secara bertahap oleh pemerintah pusat di luar skema transfer daerah, melalui Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah di tingkat daerah kabupaten atau kota.³⁹

Pengelolaan keuangan desa wajib mengacu pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Terhitung dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang mencakup asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta keteraturan dan kedisiplinan anggaran.⁴⁰ Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa

³⁸ Kementerian Desa, "Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia," *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2023* (Jakarta: Kemendes PDDT, 2023), 12.

³⁹ Jacob Hehamahua, *Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015), 44.

⁴⁰ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: Kemendagri, 2014), pasal 2-5.

keuangan desa meliputi seluruh hak dan kewajiban desa yang bisa dinilai dalam bentuk uang, termasuk aset berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pada ayat (2), dijelaskan bahwa pelaksanaan tersebut akan menghasilkan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta proses pengelolaan keuangan desa.⁴¹

3. Alokasi Anggaran Dana Desa

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan pengalokasian anggaran bertujuan untuk menjamin pengelolaan yang efektif dalam rangka menaikkan kesejahteraan penduduk. Hal tersebut dijalankan melalui berbagai upaya perbaikan infrastruktur, pemberdayaan komunitas, serta peningkatan kualitas hidup. Berikut ini adalah rincian pengelolaan anggaran yang telah disepakati sebagai berikut:

a. Pembangunan Infrastruktur

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri, infrastruktur menjadi fondasi pengembangan wilayah pedesaan.⁴² Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran. Hal ini mencakup perbaikan sarana dan prasarana seperti jalan pedesaan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 1 Ayat 3, 4, dan 5, jalan desa merupakan jenis jalan umum

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014), pasal 71 ayat 1-2.

⁴² "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa." (Jakarta, 2014).

yang dipergunakan untuk menghubungkan area wilayah permukiman yang berada di dalam satu kawasan, dan termasuk pula jalan-jalan kecil di lingkungan permukiman tersebut. Selain itu, Ayat 12 menekankan bahwa pembangunan jalan melibatkan berbagai kegiatan, seperti programing dan perkiraan biaya, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian. Pasal 2, dijelaskan mengenai penyelenggaraan jalan harus berlandaskan pada asas pemanfaatan, kenyamanan dan keselamatan, kesesuaian, kecocokan dan sepadan, adil, terbuka serta bertanggung jawab. Semua ketentuan ini bertujuan untuk memaksimalkan keberdayagunaan dan keberhasilan, serta mendorong semangat kebersamaan dan kemitraan.⁴³

Kesimpulannya, perbaikan infrastruktur jalan memerlukan perencanaan yang cermat, baik dalam hal anggaran maupun aspek teknis. Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan berbagai faktor penting seperti keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan program yang dirancang guna meningkatkan kapasitas serta kemandirian warga desa. Ini termasuk pelatihan keterampilan, pengembangan usaha ekonomi lokal, dan

⁴³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 Ayat 12 Tentang Pembangunan Jalan.” (Jakarta, 2014).

mendorong agar masyarakat terlibat aktif dalam proses pembangunan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif.⁴⁴

Kesimpulannya, pemberdayaan masyarakat di desa diarahkan melalui berbagai program yang fokus pada peningkatan kemampuan, kemandirian, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

c. Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Desa

Upaya perbaikan taraf hidup difokuskan pada program-program yang meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui bantuan langsung, program pembinaan, dan pengembangan potensi lokal.⁴⁵

Kesimpulannya, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dilakukan melalui alokasi anggaran yang diarahkan pada akses pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi, dan pengembangan potensi lokal, guna menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

⁴⁴ "Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa." (Jakarta, 2019).

⁴⁵ "Badan Pusat Statistik. Analisis Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat" (Jakarta, 2020).